



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3174-3180

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Efisiensi dan Penyesuaian Anggaran terhadap Kinerja Instansi dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur Kalimantan Tengah (Studi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah)

Novelli¹, Fajar Sriningsih², Christina Fransiska³, Ade Yuniati⁴

^{1,3,4}Universitas Palangka Raya

²Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

¹novellisumurmas@gmail.com, ²aris.tewel@gmail.com, ³christina.fransiska@feb.upr.ac.id, ⁴adeyuniati@feb.upr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyesuaian anggaran, kendala teknis, serta strategi efektivitas efisiensi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kinerja instansi dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya rasionalisasi anggaran yang sangat signifikan pada Bidang Kewaspadaan Nasional hingga mencapai 92,3% akibat kebijakan refocussing anggaran untuk mendukung visi pembangunan “Kalteng BERKAH” yang berlandaskan filosofi kearifan lokal Huma Betang. Kondisi tersebut menuntut instansi untuk melakukan penyesuaian strategi operasional agar fungsi organisasi tetap berjalan secara optimal di tengah keterbatasan fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Bidang Kewaspadaan Nasional, Bagian Keuangan, dan Bagian Program serta Perencanaan, serta didukung melalui studi dokumentasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan kegiatan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi pengurangan anggaran yang ekstrem, kinerja instansi tetap berjalan stabil melalui transformasi metode kerja yang lebih efisien. Kegiatan fisik berbasis massa dialihkan menjadi koordinasi intelijen, deteksi dini, dan komunikasi strategis yang bersifat invisible activities. Namun demikian, efektivitas penatausahaan keuangan masih menghadapi hambatan berupa gangguan infrastruktur pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan rendahnya kedisiplinan administrasi pelaporan SPJ. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan secara adaptif mampu mendukung prioritas pembangunan daerah tanpa mengurangi fungsi utama instansi dalam menjaga stabilitas wilayah dan kondusivitas daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas, Efisiensi Anggaran, Kinerja Instansi, Humas Betang, Kesbangpol

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah dalam era otonomi fiskal menuntut setiap perangkat daerah mampu menyusun perencanaan dan penganggaran secara adaptif, efektif, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah [1]. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan strategis dengan implementasi anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara optimal [2]. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi publik. Oleh karena itu, setiap perubahan atau penyesuaian anggaran harus tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas agar pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas daerah tetap berjalan secara optimal.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, arah pembangunan daerah berpedoman pada visi “Kalteng BERKAH” yang diimplementasikan melalui filosofi kearifan lokal Huma Betang. Filosofi tersebut mencerminkan nilai kebersamaan, toleransi, persatuan, dan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman. Nilai Huma Betang tidak hanya dijadikan sebagai identitas budaya daerah, tetapi juga menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan prioritas pendanaan pemerintah daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah, dituntut untuk mendukung implementasi visi tersebut melalui pelaksanaan program kerja yang efektif dan berorientasi pada stabilitas daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas sosial politik di daerah. Instansi ini berfungsi sebagai unsur pendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri [3]. Keberadaan Kesbangpol menjadi sangat penting karena stabilitas daerah merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Dalam menjalankan tugasnya, Kesbangpol tidak hanya melaksanakan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi deteksi dini, koordinasi intelijen daerah, pengawasan potensi konflik sosial, serta penguatan nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Namun demikian, dalam implementasinya sering terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran yang telah disusun dalam dokumen strategis dengan kondisi fiskal aktual pemerintah daerah. Dinamika kebijakan daerah dan perubahan skala prioritas pembangunan menyebabkan pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran secara cepat dan fleksibel. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui mekanisme rasionalisasi maupun refocussing anggaran agar alokasi dana dapat diarahkan pada program-program prioritas yang dianggap lebih mendesak bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas penganggaran menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah modern agar pemerintah tetap mampu merespons perubahan kebutuhan pembangunan secara dinamis [4].

Meskipun penyesuaian anggaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, kebijakan tersebut sering kali menimbulkan tantangan baru bagi organisasi perangkat daerah. Pengurangan anggaran yang signifikan berpotensi memengaruhi pelaksanaan program kerja, pencapaian target kinerja, hingga efektivitas pelayanan publik. Dalam sektor publik, anggaran berbasis kinerja menuntut setiap instansi tetap mampu mencapai target output dan outcome meskipun berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Keberhasilan organisasi pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan instansi dalam mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan [5].

Fenomena tersebut terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Bidang Kewaspadaan Nasional. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan informan penelitian, diketahui bahwa bidang tersebut mengalami rasionalisasi anggaran yang sangat signifikan hingga mencapai 92,3%. Pengurangan anggaran tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocussing anggaran pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan program prioritas gubernur pada sektor lain, seperti jaminan sosial dan pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kegiatan strategis yang sebelumnya telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Program sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan “*Huma Betang Go To Campus*” di Universitas Palangka Raya dan Poltekkes, terpaksa ditiadakan atau dialihkan bentuk pelaksanaannya.

Kondisi keterbatasan anggaran tersebut memaksa instansi untuk melakukan transformasi strategi operasional agar fungsi organisasi tetap berjalan secara efektif. Kegiatan yang sebelumnya bersifat fisik dan berbasis massa dialihkan menjadi kegiatan koordinasi intelijen, deteksi dini, serta komunikasi strategis yang bersifat lebih efisien. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu berdampak pada menurunnya fungsi organisasi apabila instansi mampu melakukan penyesuaian strategi kerja secara tepat. Efisiensi anggaran justru dapat mendorong organisasi untuk lebih inovatif dalam mengelola sumber daya yang tersedia sehingga target utama organisasi tetap dapat tercapai [6].

Selain menghadapi tantangan kebijakan anggaran, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadapi kendala teknis dalam penatausahaan keuangan daerah. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform utama pengelolaan keuangan masih mengalami berbagai hambatan, seperti gangguan jaringan dan proses pemeliharaan sistem yang berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan proses penginputan data keuangan dan sinkronisasi anggaran kas. Permasalahan teknis dalam sistem informasi pemerintahan dapat memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah apabila tidak didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai [7].

Di sisi lain, kendala administratif juga menjadi tantangan dalam proses penatausahaan keuangan. Keterlambatan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari unit teknis menyebabkan proses pencairan dan pelaporan anggaran menjadi terhambat. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi, terutama pada kegiatan yang membutuhkan respon cepat dan koordinasi intensif. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan koordinasi antarbidang, peningkatan disiplin administrasi, serta optimalisasi sistem pengendalian internal agar pengelolaan anggaran tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

Penelitian mengenai efisiensi dan penyesuaian anggaran sebelumnya umumnya lebih banyak menyoroti aspek efektivitas belanja, transparansi pelaporan, dan implementasi anggaran berbasis kinerja [8], [9], [10]. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas bagaimana strategi adaptasi birokrasi

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menghadapi rasionalisasi anggaran ekstrem tanpa mengabaikan fungsi utama organisasi dan nilai kearifan lokal daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian mengenai strategi penyesuaian anggaran dan transformasi metode kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung prioritas pembangunan daerah berbasis filosofi Huma Betang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyesuaian anggaran, kendala teknis yang dihadapi, serta strategi efektivitas yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga stabilitas kinerja instansi di tengah keterbatasan fiskal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis terkait pengelolaan anggaran sektor publik, khususnya dalam konteks efisiensi anggaran dan adaptasi birokrasi daerah terhadap dinamika kebijakan pembangunan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses penyesuaian anggaran, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung program prioritas daerah. Penelitian dilakukan dengan menggali informasi langsung dari informan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan dari Bidang Kewaspadaan Nasional, Bagian Keuangan, serta Bagian Program dan Perencanaan pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih merupakan pejabat atau staf yang memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta penatausahaan keuangan di lingkungan Kesbangpol. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang yang terdiri atas unsur bidang kewaspadaan, keuangan, dan perencanaan.

Tabel 1. Data Informan

No	Kode Informan	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah	Fokus Informasi
1	INF-01	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	1 Orang	Kebijakan strategis dan dampak operasional bidang
2	INF-02	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional	1 Orang	Teknis pelaksanaan kegiatan lapangan
3	INF-03	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional	1 Orang	Teknis pelaksanaan kegiatan lapangan
4	INF-04	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional	1 Orang	Teknis pelaksanaan kegiatan lapangan
5	INF-05	Kepala Bagian Keuangan	1 Orang	Pengelolaan anggaran, SIPD, dan administrasi SPJ
6	INF-06	Staf Bagian Program dan Perencanaan	1 Orang	Sinkronisasi Renstra dan dokumen perencanaan
Total			6 Orang	

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi data.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Bidang Kewaspadaan Nasional, Bagian Keuangan, dan Bagian Program serta Perencanaan. Selain itu, hasil wawancara juga didukung dengan data dokumentasi agar informasi yang diperoleh lebih valid dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Penyelarasan Strategis dan Realokasi Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyelarasan program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yang berlandaskan filosofi Huma Betang. Penyelarasan tersebut dilakukan melalui penyesuaian prioritas program kerja agar kebijakan anggaran instansi tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, proses sinkronisasi program tidak hanya berdampak pada perubahan alokasi

anggaran, tetapi juga memengaruhi pola pelaksanaan kegiatan di setiap bidang kerja, khususnya pada Bidang Kewaspadaan Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa Bidang Kewaspadaan Nasional mengalami rasionalisasi anggaran yang sangat signifikan hingga mencapai 92,3%. Pengurangan anggaran tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan refocusing anggaran pemerintah daerah yang memprioritaskan pembiayaan pada sektor lain yang dianggap lebih mendesak, seperti jaminan sosial masyarakat, pendidikan, dan program prioritas daerah lainnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan awal.

Besarnya pengurangan anggaran memberikan dampak langsung terhadap pelaksanaan program kerja di Bidang Kewaspadaan Nasional. Kegiatan yang bersifat fisik dan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung mengalami pembatasan bahkan penghapusan. Salah satu program yang terdampak adalah kegiatan sosialisasi “*Huma Betang Go To Campus*” yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan di Universitas Palangka Raya (UPR) dan Poltekkes. Kegiatan tersebut awalnya dirancang sebagai media edukasi masyarakat dan mahasiswa terkait nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta pencegahan radikalisme berbasis filosofi Huma Betang. Namun, karena keterbatasan anggaran, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, Badan Kesbangpol melakukan perubahan strategi operasional dengan mengalihkan fokus kegiatan pada penguatan koordinasi intelijen, komunikasi lintas lembaga, dan deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas daerah. Perubahan strategi ini dilakukan agar fungsi utama instansi tetap berjalan meskipun dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas. Kegiatan yang sebelumnya berbasis massa diubah menjadi kegiatan yang lebih bersifat koordinatif dan penguatan jaringan informasi lapangan atau disebut sebagai *invisible activities*.

Strategi tersebut dipilih karena dinilai lebih efisien dari sisi penggunaan anggaran. Instansi tidak lagi memerlukan biaya besar untuk penyediaan tempat kegiatan, konsumsi peserta, perjalanan dinas, maupun mobilisasi massa. Meskipun kegiatan fisik mengalami pengurangan, fungsi pengawasan dan deteksi dini tetap dijalankan melalui koordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan jaringan intelijen daerah. Dengan demikian, stabilitas keamanan daerah tetap dapat dijaga tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyesuaian anggaran tidak menyebabkan hilangnya fungsi utama organisasi, melainkan mendorong terjadinya transformasi metode kerja yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal daerah. Perubahan pola kerja tersebut menunjukkan adanya kemampuan birokrasi untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika kebijakan anggaran tanpa mengabaikan target utama organisasi. Dalam konteks ini, efisiensi anggaran lebih dimaknai sebagai upaya optimalisasi sumber daya daripada sekadar pengurangan belanja organisasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja menuntut organisasi publik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang terbatas guna mencapai target strategis instansi [11]. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi sektor publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan instansi dalam mengelola input secara efektif untuk menghasilkan outcome yang optimal. Kondisi tersebut terlihat pada Badan Kesbangpol yang tetap mampu menjaga stabilitas keamanan daerah meskipun mengalami keterbatasan fiskal yang sangat besar.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efisiensi belanja dalam sektor publik dapat dilakukan melalui perubahan metode kerja dan penyesuaian strategi operasional tanpa menghilangkan substansi tujuan program [12]. Pada penelitian ini, penyesuaian strategi berupa pengalihan kegiatan fisik menjadi koordinasi intelijen menunjukkan bahwa instansi tetap dapat menjalankan fungsi strategisnya dengan pendekatan yang lebih hemat biaya. Dengan kata lain, keberhasilan efisiensi anggaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi dan adaptasi terhadap kondisi yang dihadapi.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan rasionalisasi anggaran memberikan dampak terhadap ruang gerak organisasi dalam melaksanakan program edukatif dan pembinaan masyarakat secara langsung. Kegiatan yang bersifat preventif dan edukatif menjadi lebih terbatas karena fokus organisasi diarahkan pada upaya menjaga stabilitas keamanan melalui pendekatan koordinatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi anggaran dapat menjaga stabilitas organisasi dalam jangka pendek, keterbatasan anggaran tetap berpotensi memengaruhi pengembangan kapasitas program dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menjaga stabilitas pelaksanaan tugas organisasi di tengah

keterbatasan fiskal yang ekstrem. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan instansi dalam menentukan skala prioritas, melakukan transformasi metode kerja, dan menjaga koordinasi antarunit kerja secara efektif.

3.2. Kendala Teknis dan Akuntabilitas Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penatausahaan keuangan, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai kendala teknis yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD sebagai sistem digital yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dinilai memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi anggaran. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Bagian Keuangan, salah satu kendala utama yang sering terjadi adalah gangguan sistem dan proses maintenance SIPD yang dapat berlangsung hingga tiga hari. Kondisi tersebut menyebabkan proses penginputan data belanja dan sinkronisasi anggaran kas tidak dapat dilakukan tepat waktu. Keterlambatan penginputan data berdampak pada terhambatnya proses administrasi keuangan, termasuk proses pencairan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Selain faktor teknis sistem, kendala administratif juga menjadi hambatan dalam proses pengelolaan keuangan instansi. Rendahnya kedisiplinan beberapa unit teknis dalam menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menyebabkan proses administrasi berjalan lebih lambat. Dalam beberapa kondisi, keterlambatan pengumpulan SPJ berdampak pada tertundanya pengajuan anggaran kegiatan berikutnya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan dan kedisiplinan sumber daya manusia dalam menjalankan prosedur administrasi.

Untuk mengantisipasi risiko penyimpangan anggaran di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Bagian Keuangan menerapkan pengawasan yang ketat berbasis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA digunakan sebagai instrumen pengendalian utama dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran tetap sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Selain berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, DPA juga digunakan sebagai standar harga tertinggi (*ceiling price*) untuk menghindari terjadinya praktik mark-up atau pengeluaran di luar ketentuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administrasi tetap menjadi prioritas utama meskipun instansi berada dalam kondisi tekanan anggaran dan keterbatasan waktu. Pimpinan instansi memberikan instruksi agar setiap unit kerja tetap mematuhi prosedur administrasi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, koordinasi antara Bagian Keuangan dan Bagian Program serta Perencanaan dilakukan secara intensif guna memastikan bahwa realisasi anggaran tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip akuntansi sektor publik.

Penguatan koordinasi internal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan instansi. Melalui komunikasi yang intensif antarbagian, berbagai kendala teknis dan administratif dapat diminimalkan sehingga proses pelaksanaan kegiatan tetap berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga pada efektivitas koordinasi organisasi dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa implementasi digitalisasi keuangan daerah melalui SIPD masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek infrastruktur teknologi dan stabilitas sistem [13]. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa gangguan sistem dan keterbatasan infrastruktur dapat menghambat efektivitas proses administrasi keuangan apabila tidak didukung oleh kesiapan organisasi yang memadai.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa sinkronisasi sistem penganggaran dengan pengawasan yang ketat menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pengelolaan keuangan daerah [14]. Pada penelitian ini, penggunaan DPA sebagai instrumen kontrol menunjukkan bahwa pengawasan administratif tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Di sisi lain, penelitian ini memperlihatkan bahwa tantangan digitalisasi keuangan daerah bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan budaya kerja birokrasi. Kedisiplinan administrasi, ketepatan waktu penyampaian dokumen, dan koordinasi antarunit kerja menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.3. Analisis Efektivitas Penyesuaian Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian, penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dinilai cukup efektif dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Meskipun terjadi pengurangan

anggaran yang sangat besar, instansi tetap mampu menjalankan fungsi utama organisasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi efisiensi yang diterapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas pokok instansi secara keseluruhan.

Strategi utama yang diterapkan instansi adalah dengan mengutamakan skala prioritas dalam penggunaan anggaran kas bulanan. Program yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keamanan daerah tetap dipertahankan, sedangkan kegiatan yang memerlukan biaya besar namun tidak bersifat mendesak dilakukan penyesuaian. Pendekatan tersebut memungkinkan instansi tetap dapat menjalankan fungsi strategisnya meskipun berada dalam kondisi keterbatasan fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyesuaian anggaran tidak hanya diukur dari penghematan belanja, tetapi juga dari kemampuan instansi dalam mempertahankan stabilitas kinerja organisasi. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, Badan Kesbangpol tetap mampu melaksanakan fungsi koordinasi, deteksi dini, dan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat berjalan beriringan dengan pencapaian target kinerja apabila organisasi mampu melakukan pengelolaan sumber daya secara tepat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap terbatasnya ruang inovasi program, khususnya kegiatan yang bersifat edukatif dan pembinaan masyarakat secara langsung. Program-program sosialisasi yang sebelumnya menjadi media penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan konflik sosial menjadi lebih terbatas pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran memang mampu menjaga stabilitas organisasi dalam jangka pendek, tetapi di sisi lain dapat mengurangi intensitas program pembinaan masyarakat dalam jangka panjang [15].

Selain itu, keberhasilan penyesuaian anggaran dalam penelitian ini juga dipengaruhi oleh koordinasi yang baik antara Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. Koordinasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga agar realisasi belanja tetap sesuai dengan koridor hukum dan prinsip akuntansi sektor publik. Melalui koordinasi yang intensif, instansi mampu menentukan prioritas penggunaan anggaran secara lebih efektif sehingga kegiatan yang dianggap paling strategis tetap dapat dilaksanakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efisiensi anggaran dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya dan mendukung stabilitas kinerja organisasi apabila dilakukan melalui strategi pengelolaan yang tepat [16]. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan efisiensi anggaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menentukan prioritas program dan mengelola sumber daya yang terbatas secara efektif.

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pandangan yang menyatakan bahwa efisiensi belanja pada sektor publik tidak selalu berdampak negatif terhadap pencapaian target organisasi [17]. Efisiensi justru dapat mendorong organisasi untuk lebih inovatif dalam menentukan metode kerja yang hemat biaya namun tetap efektif dalam mencapai tujuan program.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian anggaran pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikategorikan efektif karena instansi tetap mampu menjaga stabilitas daerah sebagai target utama kinerja organisasi. Keberhasilan tersebut didukung oleh transformasi metode kerja, penguatan koordinasi internal, serta kemampuan organisasi dalam menentukan skala prioritas program di tengah keterbatasan fiskal yang ekstrem.

4. Kesimpulan

Penyesuaian anggaran pada Badan Kesbangpol merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Gubernur yang berbasis kearifan lokal Huma Betang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun terjadi rasionalisasi anggaran secara ekstrem di Bidang Kewaspadaan Nasional mencapai 92,3%, hal tersebut tidak menghambat pencapaian target kinerja utama instansi. Peran strategis instansi tetap berjalan efektif melalui fungsi koordinasi dan deteksi dini yang dioptimalkan. Kendala utama terletak pada stabilitas infrastruktur sistem informasi (SIPD) dan kedisiplinan administrasi pelaporan (SPJ). Namun secara substansi, penyesuaian ini dinilai sangat efektif dalam mengamankan visi-misi pimpinan daerah karena alokasi dana diprioritaskan secara tepat sasaran tanpa mengorbankan stabilitas wilayah. Strategi instansi yang mengubah kegiatan fisik menjadi kegiatan invisible (intelijen) terbukti mampu menjaga stabilitas daerah di tengah keterbatasan fiskal yang ekstrem, sehingga kinerja instansi dinilai tetap stabil melalui transformasi metode kerja yang lebih efisien. Saran penelitian ini adalah perlunya peningkatan stabilitas sistem digital dan penguatan koordinasi administratif agar penyesuaian anggaran tidak menghambat ritme kerja organisasi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas fokus penelitian tidak hanya pada satu instansi, tetapi juga pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang mengalami kebijakan

refocussing serupa untuk melihat perbandingannya. Selain itu, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain seperti kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem informasi akuntansi pemerintahan serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara keseluruhan.

Referensi

- [1] Iksan, *TRANSFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: Sistem, Tantangan, dan Strategi Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit Kbm Indonesia, 2026.
- [2] M. Tukiran, N. P. Sari, dan G. E. Dwibala, *Perencanaan Strategis Organisasi Pemerintah*. PT Kanisius.
- [3] R. A. Hutabarat dan G. Liauw, "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menjaga Stabilitas Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau," diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025. Diakses: 15 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://eprints.ipdn.ac.id/20272/>
- [4] V. Pongoh, S. S. Pangemanan, dan H. Gamaliel, "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 9, no. 2, Apr 2021, doi: 10.35794/emba.v9i2.33756.
- [5] I. Harindra dan S. Sapari, "Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, vol. 8, no. 2, Des 2019, Diakses: 13 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/246>
- [6] D. S. Amalia dan M. T. Hidayat, "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Pengelolaan Organisasi Sektor Publik," *Journal of Social Humanities and Education*, vol. 1, no. 1, hlm. 39–46, Agu 2025, doi: 10.65310/ty12h334.
- [7] M. Kardina, A. Frinaldi, A. Asnil, dan N. E. Putri, "Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia," *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, vol. 11, no. 2, hlm. 615–620, Des 2024, doi: 10.37676/professional.v11i2.7231.
- [8] R. Saleh dan N. Andriana, "Efektivitas dan Efisiensi Belanja Berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja pada KPP Pratama Bulukumba," *INFO ARTHA*, vol. 5, no. 2, hlm. 130–139, Des 2021.
- [9] F. A. Fadilah dan A. A. Sari, "Analisis Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah," *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, vol. 2, no. 1, hlm. 294–297, Agu 2025.
- [10] R. Dhamara dan A. Fauzi, "Efektivitas Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Kinerja Kementerian Lembaga," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, vol. 3, no. 1, hlm. 104–110, Apr 2023, doi: 10.56127/jaman.v3i1.666.
- [11] M. F. Junery dan N. Norhanisah, "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, vol. 2, no. 1, hlm. 142–150, Jun 2018.
- [12] E. D. Tanti, "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan)," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3, no. 1, hlm. 16–21, Jan 2015.
- [13] N. Naida dan D. Sartika, "Tantangan dan Strategi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas dengan SIPD: Studi Kualitatif di Kabupaten Tojo Una-Una," *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, vol. 19, no. 2, hlm. 99–109, Des 2024, doi: 10.51277/keb.v19i2.208.
- [14] J. A. Bajamal, D. Darman, M. Nofal, dan C. R. K. Bidin, "Peran Sosialisasi Pengelolaan Dana Dalam Meningkatkan Realisasi Anggaran: Indonesia," *Journal Of Human And Education (JAHE)*, vol. 5, no. 1, hlm. 491–506, Feb 2025, doi: 10.31004/jh.v5i1.2218.
- [15] D. Viroza, P. Yasmin, dan M. Rizal, "Optimalisasi Anggaran Kas dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan," *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, vol. 2, no. 1, hlm. 434–442, Mar 2025, doi: 10.61722/jaem.v2i1.4171.
- [16] N. Ravenska, Y. R. Ginanjar, A. B. Nugroho, dan E. Nurmalia, "Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja: Studi Tentang Pengelolaan Keuangan di RSUP Dr. Hasan Sadikin," *JAKUMA : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, vol. 6, no. 1, hlm. 77–90, Jul 2025, doi: 10.31967/jakuma.v6i1.1427.
- [17] S. N. Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *qawwam*, vol. 13, no. 1, hlm. 1–13, Des 2019, doi: 10.20414/qawwam.v13i1.1619.